

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS DI KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
Fitria Almaysuri  
NPM: 2156041024**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh**

**Fitria Almaysuri**

Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan, menghadapi tantangan dalam pengelolaan volume sampah yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya sesuai kebijakan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2022. Fenomena permasalahan di wilayah ini adalah proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis tidak sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah masih belum berjalan secara optimal karena tingkat pengelolaan sampah rendah dan sampah tidak dikelola dengan baik. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan antara lain kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, kondisi sosial serta cakupan wilayah yang tidak menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan prioritas dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang modern, intensitas edukasi dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mendorong investor untuk bekerja sama mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Sampah Rumah Tangga, Lampung Tengah.

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF HOUSEHOLD WASTE AND SIMILAR WASTE MANAGEMENT POLICY IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY**

**By**

**Fitria Almaysuri**

*Central Lampung Regency, as one of the regions in Lampung Province with significant population growth, faces challenges in managing its increasing volume of waste. This study aims to analyze the implementation of household and similar waste management policies in Central Lampung Regency and identify inhibiting factors in its implementation in accordance with Regent Regulation No. 38 of 2022. The problematic phenomenon in this region is that the process of implementing household and similar waste management policies is not fully optimal. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The results of the study using the Van Meter and Van Horn model indicate that the implementation of waste management policies in Central Lampung Regency is still not optimal due to low levels of waste management and waste is not managed properly. Several inhibiting factors identified include lack of understanding, limited resources, social conditions, and incomplete coverage. Therefore, it is necessary for the local government to prioritize waste management, develop modern waste management infrastructure, intensify education and community empowerment, and increase synergy between the government and the community. This research also encourages investors to work together to achieve sustainable and environmentally friendly waste management in Central Lampung Regency.*

*Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Household Waste, Central Lampung.*

JUDUL SKRIPSI

**: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS DI  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa

**: Fitria Almaysuri**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2156041024**

Program Studi

**: Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**

**NIP. 19710615 200501 1 003**

**Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**

**NIP. 19821212 200801 2 017**

**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

**Dr. Susana Indriyati, S.IP., M.Si.**

**NIP. 19700914 200604 2 010**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**

**Sekretaris : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**

**Penguji : Dr. Susana Indriyati, S.IP., M.Si.**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si**

**NIP. 19760821 200003 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 September 2025**



A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Nana Mulyana.

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Dewie Brima Atika.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dr. Susana Indriyati.

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Prof. Dr. Anna Gustina Zainal.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 03 September 2025  
Yang membuat pernyataan,



Fitria Almaysuri  
NPM. 2156041024

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fitria Almaysuri, lahir di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2002. Penulis merupakan anak perempuan pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Tazhir Alpian dan Ibu Susilawati. Pendidikan formal penulis dimulai pada tahun 2009 di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Kelurahan Bandar Jaya Barat dan diselesaikan pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kecamatan Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas ditempuh di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kecamatan Terbanggi Besar dan diselesaikan pada tahun 2021.

Pada bulan agustus tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN atau PMB Mandiri. Selama menjalani masa perkuliahan penulis telah mengikuti berbagai kegiatan yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus. Penulis mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa, yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) pada tahun 2022 menjadi anggota bidang Kajian Pengembangan Keilmuan dan pada tahun 2023 sebagai anggota bidang Data dan Informasi.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 di Desa Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya pada bulan Februari sampai Agustus tahun 2024 penulis juga melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bandar Lampung.

## **MOTTO**

Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui

**(Qs. Al-Baqarah: 216)**

Belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok.

**(Albert Einstein)**

Didiklah hatimu untuk tidak sombong, didiklah matamu agar tidak memandang rendah orang lain dan didiklah mulutmu agar bicaramu tidak melukai hati orang lain.

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan  
petunjuk-Nya

Dengan kerendahan dan ketulusan hati,

Karya ini kupersembahkan kepada:

### **Ayah dan Ibuku Tercinta**

Terima kasih atas cinta, doa, dukungan dan pengorbanan yang tak pernah putus.  
Semangat dan kasih kalian menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkahku.

### **Adik-Adikku Tersayang**

Terima kasih telah memberikan motivasi dan mendukung dengan caranya masing-  
masing. Kehadiran kalian adalah sumber semangat yang luar biasa.

### **Para Dosen dan Civitas Akademika**

Yang telah memberikan ilmu, membimbing dengan sabar serta mengarahkan  
perjalanan pendidikan ini dengan penuh keikhlasan.

### **Almameter Kebanggaan**

UNIVERSITAS LAMPUNG

## SANWANCA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karuani-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak akan dapat menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, doa serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kedua orangku tercinta Bapak Tazhir Alpian dan Ibu Susilawati yang telah menjadi sumber cahaya dalam gelap, tempat berpulang dalam lelah dan pelindung dalam segala kondisi. Terima kasih atas segala pengorbanan dan semua hal yang telah diberikan selama ini. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah SWT, agar kelak bisa melihat anakmu melangkah lebih jauh lagi dalam hidup, membawa kebanggaan yang tak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kalian yang telah mencintai tanpa syarat.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si. Selaku dosen pembimbing utama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, kebaikan dan bimbingan yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. Selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi. Saran dan perhatian ibu sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. Selaku dosen penguji skripsi penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun serta arahan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh informan penelitian, Bapak Syarifudin, Bapak Rustanto, Bapak Hendra, Bapak Purwadi, Bapak Priyadi, Bapak Taruna dan Abang Ahlun atas waktunya serta memberikan informasi yang mendukung kelancaran dan kelengkapan dalam membantu proses penelitian penulis.
10. Seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah atas bantuan, kerja sama, serta dukungan yang telah diberikan selama proses dan pelaksanaan penelitian.
11. Adik-adikku tersayang, Muhammad Wildan Ergian, Muhammad Agung Khairallah dan Ayesha Azzalea Putri atas semangat dan keceriaan yang selalu menjadi penyemangat penulis.
12. Seluruh anggota keluargaku, terima kasih atas segala doa dan dukungan serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
13. Seseorang yang bernama Yosef Aldo Dusma Utama Sinaga, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kesabaran yang tulus. Terima kasih telah menjadi pendengar setia setiap keluh kesah, penyemangat serta selalu ada sejak awal perkuliahan hingga saat ini.

14. Sahabatku Gista, Anggi dan Keysa, terima kasih atas persahabatan, kebaikan serta tawa dan cerita yang selalu menjadi penghibur dan penguat hati penulis selama bangku sekolah hingga sekarang.
15. Para sahabat perjuanganku Tata, Bunga, Inez, Lisel, terima kasih atas kebersamaan, dukungan serta semangat yang kita bagi bersama dalam menghadapi setiap tantangan selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini
16. Teman-teman KKN yaitu Reni, Merisa, Nadip, Hesti, Irvan, Jaki atas kerja sama, kebersamaan dan kenangan berharga yang telah kita lalui bersama selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
17. Teman-teman kelas Reguler M, terima kasih atas kebersamaan selama awal perkuliahan hingga sampai ditahap ini.
18. Kepada seluruh teman-teman GILGAMARA dan mba abang HIMAGARA, terima kasih atas pengalaman dan saran bantuannya selama masa perkuliahan.
19. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
20. Kepada diriku yang telah berjuang, terima kasih karena telah bertahan dan tidak menyerah. Ini bukan hanya sekedar lembaran-lembaran kertas tetapi bukti ketekunan, kesabaran dan keberanianmu. Sekarang saatnya memberi penghargaan pada diri sendiri atas semua kerja keras yang telah dilakukan dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Terima kasih diriku. Kita berhasil.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SANWANCA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	13
2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	15
2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.4 Tinjauan Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.....	23
2.5 Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah .....	25

2.5.1 Pengertian Pengelolaan Sampah .....	25
2.5.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah .....	26
2.6 Kerangka Pikir .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian .....	29
3.3 Lokasi penelitian .....	31
3.4 Sumber data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6 Teknik Analisa Data.....	35
3.7 Teknik Uji Keabsahan Data .....	37
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah .....	39
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Terbanggi Besar .....	43
4.1.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.....	45
4.2 Hasil Penelitian .....	48
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di Kabupaten Lampung Tengah.....	48
4.2.2 Matriks Temuan Peneliti .....	79
4.3 Pembahasan.....	80
4.3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di Kabupaten Lampung Tengah.....	81
4.3.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tanga dan Sampah Sejenis di Kabupaten Lampung Tengah .....	97
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>100</b>
5.1 Kesimpulan .....	100
5.2 Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Jumlah Timbulan Sampah Tahun 2023 Provinsi Lampung .....	3
Tabel 2. Jumlah Berat Timbulan Sampah (ton/tahun) Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Sampai 2024.....	4
Tabel 3. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Lampung Tengah .....	6
Tabel 4. Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 5. Informan Terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga .....	33
Tabel 6. Dokumentasi .....	34
Tabel 7. Gambaran Objek Observasi Penelitian .....	35
Tabel 8. Jumlah Penduduk dan Timbulan Sampah Tingkat Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah 2024 .....	40
Tabel 9. Tingkat Partisipasi Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.....	42
Tabel 10. Upah Minimum Kabupaten Lampung Tengah .....	42
Tabel 11. Rata-Rata Pendapatan Pekerja di Kabupaten Lampung Tengah .....	43
Tabel 12. Luas Wilayah Kecamatan Terbanggi Besar.....	44
Tabel 13. Jumlah Penduduk Kecamatan Terbanggi Besar.....	44
Tabel 14. Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Tengah.....	46
Tabel 15. Capaian Tujuan Kebijakan Pengelolaan Sampah .....	56
Tabel 16. Data Anggaran Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Tengah .....	59
Tabel 17. Struktur Organisasi Bidang Pengelolaan Sampah Kabupaten Lampung Tengah.....	62
Tabel 18. Matriks Berdasarkan Hasil Temuan Peneliti .....	79
Tabel 19. Realisasi Standar Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Tengah .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Komposisi sampah Kabupaten Lampung Tengah.....	5
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	28
Gambar 3. Komponen Teknik Analisis Data Kualitatif.....	36
Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah.....	39
Gambar 5. Peta Wilayah Kecamatan Terbanggi Besar.....	43
Gambar 6. Tempat Dinas Kabupaten Lampung Tengah.....	45
Gambar 7. Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah....	51
Gambar 8. UPTD Bank Sampah DLH Berjaya di Kabupaten Lampung Tengah..	51
Gambar 9. Pemilahan di UPTD Bank Sampah DLH Berjaya di Kabupaten Lampung Tengah .....	52
Gambar 10. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kabupaten Lampung Tengah.....	53
Gambar 11. Sarana Pengangkut Sampah di Kabupaten Lampung Tengah .....	53
Gambar 12. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Lampung Tengah.....	54
Gambar 13. Alat Pencacah Kertas dan Plastik.....	58
Gambar 14. Rapat Koordinasi Petugas Lapangan.....	65
Gambar 15. Komunikasi Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan .....	67
Gambar 16. Kegiatan Evaluasi Petugas .....	70
Gambar 17. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sampah.....	71
Gambar 18. Kondisi Lingkungan di Lampung Tengah .....	75
Gambar 19. Dukungan Politik Bupati.....	78

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan residu dari kegiatan manusia sehari-hari yang tidak lagi bernilai ekonomis dan perlu dikelola secara sistematis agar tidak mencemari lingkungan (Damanhuri, 2020). Selain itu, pengertian lain sampah berdasarkan *World Health Organization* (WHO) yaitu sampah merupakan bahan yang tidak digunakan, tidak diinginkan, serta dipakai lagi, baik yang bersumber dari aktivitas makhluk hidup maupun proses alam. Permasalahan umum sampah menjadi permasalahan krusial yang terjadi di berbagai macam negara, termasuk negara Indonesia. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh serta berhubungan satu dengan lainnya yang meliputi pengurangan dan penanganan timbulan sampah. Penyebabnya mencakup beberapa faktor yaitu pertumbuhan penduduk, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, serta perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan masih tinggi. Secara umum, jika dihadapkan dengan permasalahan pengelolaan sampah yang tidak efisien, seperti memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah serta pemrosesan akhir yang kurang maksimal, sehingga sampah sering menumpuk di tempat pembuangan akhir sampah serta dibuang secara ilegal.

Berdasarkan jenisnya sampah dikelompokkan kedalam dua jenis, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga mencakup kedua jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik. Dalam UU No.18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah mendefinisikan sampah rumah tangga yaitu sampah yang bersumber dari aktivitas rumah tangga, tidak mencakup tinja maupun sampah spesifik. Contoh sampah rumah tangga yaitu sisa makanan, daun dan ranting kering, botol,

plastik, kertas, kaca dan kaleng. Sampah sejenis rumah tangga mencakup sampah yang bersumber dari kawasan komersial (kemasan makanan dan minuman), kawasan industri (limbah industri), kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan sebagainya.

Sampah rumah tangga dan sampah sejenis menjadi salah satu masalah lingkungan yang selalu berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 69,9 juta ton. Dari komposisi sampah yang ada di Indonesia, didominasi oleh sampah rumah tangga 60,52%, sampah pasar 11,59%, sampah Kawasan 9,74%, sampah peniagaan 6,45%, sampah perkantoran 6%, sampah fasilitas publik 3,72% dan sampah lainnya 1,98%. Hal ini menunjukkan komposisi sampah terbanyak di Indonesia yaitu sampah rumah tangga.

Dampak limbah rumah tangga dan sampah sejenis terhadap lingkungan hidup yaitu pencemaran air, udara dan tanah. Sampah yang tidak diatasi secara baik akan menjadi tantangan yang berdampak pada kesehatan manusia. Peningkatan populasi lalat, tikus, serta hama pengganggu lainnya yang dapat menyebabkan peningkatan wabah penyakit menular. Sehingga hal ini harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah untuk mencegah pencemaran lingkungan yang memerlukan adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai lingkungan hidup (Komarudin et al, 2023).

Dengan ini pemerintah atau presiden menetapkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan sampah di Indonesia dengan target yang telah ditentukan yaitu pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70%.

Kementerian Lingkungan dan Kehutanan juga mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan dan strategi penanganan sampah yaitu Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan dan Kehutanan terdapat 21 provinsi dan 353 Kabupaten yang telah menetapkan dokumen kebijakan dan strategi daerah.

Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang merancang dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pemerintah Provinsi Lampung memiliki permasalahan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis. Berikut terdapat data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengenai jumlah timbulan sampah di Provinsi Lampung:

**Tabel 1. Data Jumlah Timbulan Sampah Tahun 2023 Provinsi Lampung**

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Pengurangan Sampah (Ton/Tahun)	% Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah (Ton/Tahun)	% Penanganan sampah
<b>Lampung Tengah</b>	<b>1.508,33</b>	<b>251,850.93</b>	<b>25,387.42</b>	<b>10.08</b>	<b>52,719.51</b>	<b>20.93</b>
Tulang Bawang	445,17	63,300.93	0.15	0.00	4,336.20	6.85
Tanggams	662,54	134,920.35	5,990.16	4.44	10,565.44	7.83
Lampung Timur	1.142,58	207,581.71	0.00	0.00	1,091.35	0.53
Way Kanan	491,11	70,647.06	2,294.70	3.25	6,717.15	9.51
Pesawaran	494,28	70,907.97	879.83	1.24	19,710.00	27.80
Pringsewu	419,59	59,628.59	6,961.26	11.67	16,094.45	26.99
Tulang Bawang Barat	295,94	42,284.52	8,107.26	19.17	13,140.00	31.08
Pesisir Barat	169,75	24,063.14	-	-	1,846.66	7.67
Bandar Lampung	1.202,07	287,058.27	13,534.91	4.72	266,450.00	92.82
Metro	173,87	38,568.31	6,802.42	17.64	28,071.31	72.78
<b>Total</b>	<b>9.313,99</b>	<b>1.250.811,78</b>	<b>69.958,11</b>	<b>72.21</b>	<b>420.742,97</b>	<b>304.79</b>

*Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*

Berdasarkan tabel diatas terdapat data jumlah timbulan sampah, data pengurangan dan data penanganan sampah tahun 2023 di Provinsi Lampung. Dapat disimpulkan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan yang pertama dengan jumlah timbulan sampah 287,058.27 Ton/Tahun. Setelah itu Kabupaten Lampung Tengah menjadi daerah kedua dengan jumlah timbulan sampah terbanyak yaitu 251,850.93 Ton/Tahun.

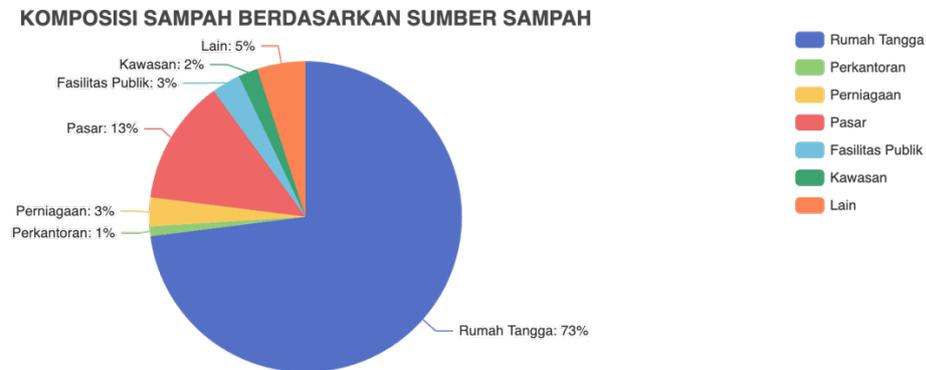
Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 301 desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Lampung. Berikut ini jumlah timbulan sampah 28 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dari 2022-2024:

**Tabel 2. Jumlah berat timbulan sampah (ton/tahun) per kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022 sampai 2024**

No	Kecamatan	Timbulan sampah tahun 2022	Timbulan sampah tahun 2023	Timbulan sampah tahun 2024
1.	Padang Ratu	6.733	6.751	6.928
2.	Selagai Lingga	4.621	4.650	4.737
3.	Pubian	5.720	5.733	5.889
4.	Anak Tuha	5.130	5.160	5.261
5.	Anak Ratu Aji	2.187	2.193	2.251
6.	Kalirejo	9.204	9.262	9.437
7.	Sendang Agung	5.144	5.159	5.292
8.	Bangun Rejo	7.730	7.744	7.961
9.	Gunung Sugih	9.307	9.397	9.510
10.	Bekri	3.675	3.702	3.764
11.	Bumi Ratu Nuban	4.330	4.375	4.421
12.	Trimurjo	7.008	7.038	7.200
13.	Punggur	5.387	5.437	5.507
14.	Kota Gajah	4.580	4.608	4.697
15.	Seputih Raman	6.597	6.637	6.765
16.	<b>Terbanggi Besar</b>	<b>16.429</b>	<b>16.641</b>	<b>16.733</b>
17.	Seputih Agung	6.843	6.906	6.997
18.	Way Pengubuan	12.047	12.300	12.168
19.	Terusan Nunyai	11.593	11.548	12.002
20.	Seputih Mataram	12.876	12.934	13.219
21.	Bandar Mataram	12.011	12.178	12.497
22.	Seputih Banyak	12.248	12.360	12.516
23.	Way Seputih	5.017	5.069	5.121
24.	Rumbia	9.606	9.666	9.844
25.	Bumi Nabung	8.574	8.603	8.814
26.	Putra Rumbia	4.916	4.944	5.041
27.	Seputih Surabaya	12.547	12.610	12.874
28.	Bandar Surabaya	9.154	9.194	9.398

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah*

Adapun data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengenai persentase komposisi sampah berdasarkan sumber sampah di Kabupaten Lampung Tengah:



**Gambar 1. Komposisi sampah Kabupaten Lampung Tengah**

*Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*

Berdasarkan data komposisi sampah di atas diketahui bahwa jenis sampah yang paling tinggi adalah sampah jenis rumah tangga dengan persentase 73%, pasar 13%, perniagaan 3%, fasilitas publik 3% serta Kawasan 2% dan lain sebagainya 5%. Dapat dilihat sampah rumah tangga merupakan penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Lampung Tengah hingga mencapai total persentase 73%.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah merancang kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jakstrada merupakan arah kebijakan dan strategi yang terpadu dan berkelanjutan dalam penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga di tingkat kabupaten. Adapun isi kebijakan tersebut:

Bab 1: Ketentuan umum.

Bab 2: Arah kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.

Bab 3: Penyelenggaraan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis.

Bab 4: Pendanaan penyelenggaraan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis

Bab 5: Ketentuan penutup.

Pada Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 pada bab 2 pasal 3 dijelaskan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Selanjutnya pada bab 2 pasal 5 memiliki target pengurangan dan penanganan sampah, yaitu pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dan target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di tahun 2025. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah mengenai capaian kinerja pengelolaan sampah sebagai berikut:

**Tabel 3. Capaian kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Lampung Tengah**

Tahun	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Pengurangan Sampah (Ton/Tahun)	% Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah (Ton/Tahun)	% Penanganan sampah
2022	287,993.98	19,698.79	6.84	37,433.21	12.99
2023	251,850.93	25,387.42	10.08	52,719.51	20.93
2024	272,756.78	30,496.97	11.18	60,384.50	22.14

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah*

Terlihat pada tabel capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022, 2023 dan 2024 belum memenuhi target kebijakan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 yaitu 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu diidentifikasi dan dievaluasi lebih lanjut.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya melaksanakan target pengurangan dan penanganan kebijakan dilakukan dalam bentuk yaitu pengurangan dengan membatasi timbulan sampah, membentuk bank sampah dan penyediaan sarana dan prasarana. Serta penanganan dengan sistem konvensional (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir). Pengelolaan sampah pada bank sampah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah belum tersebar secara merata dan proses pengolahan sampah yang dilakukan pada bank sampah belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) terhambat di Kabupaten Lampung Tengah karena dari segi jumlah TPS3R, kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pengolahan sampah berkelanjutan dan juga kurangnya dukungan edukasi ke masyarakat mengenai metode pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah juga bekerja sama dengan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah seperti camat, lurah untuk bertugas bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di daerahnya.

Beberapa kota di Indonesia yang menjadi acuan dalam pengelolaan sampah yaitu dengan menerapkan program, teknologi canggih untuk penanganan sampah dan menerapkan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam penanganan sampah. Contoh kota yang telah berhasil menerapkan metode 3R yaitu Kota Surabaya Kota ini menjadi salah satu percontohan sukses penerapan 3R, khususnya dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo. Surabaya telah memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk

mengubah sampah menjadi energi, mendukung sistem ekonomi sirkular, dan mengurangi volume sampah secara signifikan. Konsep ini juga didukung oleh kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah yang kuat. Kota kedua yaitu Kota Bandung ini menerapkan berbagai inisiatif seperti pemilahan sampah organik dan anorganik serta program edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya metode pengelolaan sampah 3R.

Disimpulkan dari latar belakang di atas pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengenai jumlah timbulan sampah di Provinsi Lampung bahwa Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten nomor kedua yang memiliki jumlah timbulan sampah terbanyak dan menjadi daerah yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah belum mencapai tujuan dari Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Selain itu, sarana seperti truk sampah, gerobak sampah dan alat berat lainnya serta prasarana seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pengelola sampah di Kabupaten Lampung Tengah belum tersebar secara merata dan berfokus di wilayah pusat kota. Selain itu jenis Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kabupaten Lampung Tengah masih berjenis *open dumping* yaitu sampah dibuang begitu saja di tanah cekungan terbuka tanpa pengolahan lebih lanjut. Cara ini dirasa sangat sederhana, tetapi dapat mencemari lingkungan dan mempengaruhi proses target penanganan sampah di pemrosesan akhir karena tidak ada proses pengolahan lebih lanjut sampah. Hal lainnya yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengelola sampah.

Implementasi kebijakan publik menjadi tahap terpenting pada siklus kebijakan yang menjadi penentu apakah tujuan kebijakan tercapai atau tidak (Hermanto Suaib, 2022). Kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga yaitu salah satu kebijakan yang dapat di implementasikan dengan tujuan yang baik, tetapi apabila kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik maka kebijakan ini tidak

berhasil mencapai tujuannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti menarik judul penelitian **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dengan ini tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh deskripsi secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan sebuah kebijakan publik mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di tingkat kabupaten melalui perspektif ilmu yang didapat selama perkuliahan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya yaitu:

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dengan menghasilkan rekomendasi saran untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah yang berkaitan dengan penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.

2. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan publik serta memberikan referensi bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dalam aspek penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Randi (2018:15), penelitian terdahulu merupakan hasil kajian dari peneliti lain yang berfungsi sebagai pembanding bagi penelitian yang akan dilakukan. Studi-studi terdahulu menjadi landasan penting dalam pelaksanaan penelitian karena membantu memperluas dan memperdalam teori yang relevan. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat menjadi sumber inspirasi dalam proses pelaksanaan penelitian serta sebagai tolok ukur untuk menilai kelebihan dan kekurangan yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti:

**Tabel 4. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
1	Mohamad Iqbal, R. M. Mulyadin, Kuncoro Ariawan dan Subarudi (2022)	Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Provinsi Jakarta	Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penanganan sampah di DKI Indonesia dianggap belum maksimal pada penyelenggarannya. Hal ini ditinjau berdasarkan adanya sampah yang tidak dikelola secara baik. Berdasarkan segi penilaian dalam menerapkan kebijakan	Relevansi dalam penelitian ini adalah kesamaan dalam penggunaan teori menurut model kebijakan Van Meter Van Horn dalam membahas penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

			<p>pengelolaan sampah sudah dilaksanakan secara baik, misalnya seperti kontribusi setiap pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berjalan dari komitmen dalam mengelola sampah. Penegakan hukum pada saat menerapkan sanksi telah berlangsung, tetapi kurang maksimal dalam mengurangi penimbunan sampah di DKI Indonesia.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah dari lokasi yaitu di Provinsi Jakarta yang mencakup wilayah luas sedangkan penelitian ini berfokus hanya wilayah daerah kabupaten Lampung Tengah yang menekankan tentang kebijakan pengelolaan sampah pemerintah daerah setempat.</p>
2	<p>Yunike Sarah Sitompul, Lumongga sianipar, Febiola Sembiring, Alfon Apriel dan Ivanna (2024)</p>	<p>Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tegal Rejo</p>	<p>Hasil penelitiannya yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tegal Rejo terlihat kurang maksimal. Sejumlah hal yang menjadi penyebabnya seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, rendahnya dukungan masyarakat, terbatasnya sumber dana, serta hubungan koordinasi bersama lembaga terkait yang dibutuhkan dalam memperoleh data dan penyelenggaraan aturan pengendalian sampah.</p>	<p>Relevansi dalam penelitian ini adalah kesamaan dalam objek penelitian yaitu berfokus pada kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah serta mengidentifikasi tantangan serupa dalam pengelolaan sampah.</p> <p>Perbedaan dari penelitian ini yaitu berdasarkan landasan teori menggunakan kriteria efektivitas Sedangkan penelitian ini menggunakan landasan teori implementasi kebijakan publik.</p>
3	<p>Putranto Manalu, Fahmi Syahpreza,</p>	<p>Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan</p>	<p>Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh sinergitas antar</p>	<p>Relevansi dalam penelitian ini adalah kesamaan dalam regulasi nasional</p>

Ermi Girsang, Chrismis Novalinda (2022)	Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai	komponen organisasi mulai dari regulasi, SDM, dukungan pimpinan hingga anggaran yang memadai. Dengan berbagai hambatan tersebut, penting bagi stakeholder untuk memprioritas penyusunan peraturan daerah pendukung kebijakan Jakstranas agar pelaksanaan kegiatan memiliki payung hukum yang jelas.	pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, keterkaitan dalam identifikasi faktor penghambat kebijakan pengelolaan sampah.  Perbedaan dari penelitian ini yaitu Penelitian di Kota Binjai lebih menekankan pada hambatan spesifik yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal, sedangkan penelitian di Lampung Tengah lebih luas, mencakup faktor pendukung dan penghambat serta strategi implementasi kebijakan secara menyeluruh.
---	------------------------------------	---	---

*Sumber: diolah oleh peneliti, 2025*

## 2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan sering dikaitkan dengan keputusan yang dibuat oleh individu maupun kelompok pada suatu organisasi, lembaga, atau pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, Kebijakan dapat diartikan sebagai sekumpulan prinsip dan konsep yang menjadi pedoman atau dasar dalam merancang serta melaksanakan suatu kegiatan, kepemimpinan, dan pola perilaku tertentu. Sementara itu, istilah publik merujuk pada sektor ekonomi yang dijalankan oleh negara atau pemerintah, yang mencakup unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, serta masyarakat yang memiliki keterkaitan dan

pengaruh terhadap kehidupan suatu bangsa, negara, atau komunitas (Wikipedia).

Kebijakan publik dalam perspektif hukum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menguraikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Pemerintah pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan publik sendiri merupakan keputusan yang diformulasikan oleh negara, khususnya oleh pemerintah, sebagai strategi untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang telah ditetapkan. Menurut (Nugroho, 2014) kebijakan publik dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Kebijakan publik berskala makro atau umum.
- b. Kebijakan publik berskala menengah (meso).
- c. Kebijakan publik berskala mikro.

Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dijalankan oleh individu atau kelompok guna mengatasi suatu persoalan (Idris Patarai, 2020). Sementara itu, Fredrich memandang kebijakan publik sebagai suatu langkah yang terarah pada pencapaian tujuan, baik oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang berfungsi untuk merespons tantangan serta memanfaatkan peluang dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Idris Patarai, 2020). Dari sejumlah pendapat ahli diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik

merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara maupun pemerintah kepada warga negara dengan tujuan untuk meraih tujuan maupun target yang ditetapkan.

## **2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik**

### **2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi merupakan tahapan dalam merealisasikan suatu tujuan yang telah direncanakan. Pada tahapan ini, diperlukan perencanaan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti potensi keberhasilan dan risiko kegagalan, tantangan yang mungkin dihadapi, peluang yang bisa dimanfaatkan, serta sejauh mana kemampuan organisasi pelaksana dalam merealisasikan kebijakan tersebut (Syahrudin, 2019).

Beberapa pakar mengemukakan pandangannya mengenai makna implementasi kebijakan publik. Salah satunya, Paul A. Sabatier dan Daniel (Subianto, 2020), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk pelaksanaan dari keputusan kebijakan dasar yang umumnya dituangkan dalam Undang-Undang, namun juga dapat berupa perintah eksekutif atau putusan penting dari lembaga yudikatif. Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan isu yang akan ditangani, merinci tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta menyusun struktur dan strategi pelaksanaan kebijakan secara sistematis. Menurut Wahab (2008), implementasi kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun lembaga pemerintahan dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini merupakan upaya untuk mewujudkan keputusan menjadi tindakan nyata sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dirancang.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses penerjemahan keputusan kebijakan menjadi aksi nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada kerja sama dan keselarasan antara berbagai elemen yang terlibat. Jika terdapat hambatan pada salah satu aspek, hal tersebut dapat mengganggu pencapaian hasil kebijakan yang telah ditargetkan.

### **2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

Berdasarkan pengkajian ilmu kebijakan publik terdapat beragam model atau teori yang sudah dikembangkan mengenai model implementasi kebijakan, Dalam (Nugroho, 2014:167) secara umum terdapat dua pendekatan utama dalam implementasi kebijakan publik, yaitu pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*) dan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Berikut ini adalah beberapa model implementasi kebijakan publik yang dapat dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan kebijakan:

#### **1) Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Model pertama dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn sebagaimana dikutip dalam (Van Meter dan Van Horn, 1975), yang dikenal sebagai salah satu model klasik dalam implementasi kebijakan. Model ini menekankan bahwa proses implementasi berlangsung secara linier, dimulai dari perumusan kebijakan publik, kemudian dijalankan oleh pelaksana (*implementor*), hingga akhirnya menghasilkan output sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan. Model kebijakan ini menjelaskan enam variabel yang berhubungan antara kebijakan terhadap hasil kerja, yakni standar maupun tujuan kebijakan, sumber daya aturan, komunikasi diantar organisasi, ciri khas lembaga penyelenggara, kondisi perekonomian, sosial, politik dan disposisi penyelenggara.

- (1) Standar dan tujuan kebijakan. Sebuah faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan hasil kerja kebijakan yaitu standar maupun tujuan aturan. Sehingga kedua indikator ini harus jelas agar pihak penyelenggara aturan tidak muncul beragam interpretasi yang tidak sama terhadap seseorang yang membuat aturan. Adanya beragam interpretasi atas tujuan aturan akan menjadikan ketidakberhasilan pada penyelenggaraan kebijakan.
- (2) Sumber daya. Disamping indikator kinerja kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan harus jelas, sumber daya yang mendukung penyelenggaraan aturan tidak dapat disepelekan. Sumber daya ini berasal dari manusia, pendanaan serta beragam sarana dan prasarana yang bisa memperlancar penyelenggaraan sebuah kebijakan.
- (3) Karakteristik organisasi pelaksana. Menurut Van Meter dan Van Horn, karakteristik dari agen pelaksana yaitu struktural organisasi pelaksana utama, pola hubungan yang semuanya berdampak pada pelaksanaan kebijakan. Disamping itu, cakupan maupun luas wilayah implementasi kebijakan harus dihitung manakala menjadi penentu agen penyelenggara. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka akan semakin besar agen yang terlibat.
- (4) Komunikasi antar organisasi terkait. Terdapat faktor pendukung lainnya yang harus dilihat untuk melancarkan penyelenggaraan aturan, seperti komunikasi antar organisasi. Komunikasi diantara organisasi harus melancarkan proses jalannya informasi berdasarkan sumber-sumber informasi guna menjelaskan standar maupun indikator kinerja kebijakan. Baik maupun tidaknya saluran dalam berkomunikasi antar organisasi penyelenggara kebijakan dapat berpengaruh pada kesuksesan maupun kegagalan penyelenggaraan kebijakan tersebut.
- (5) Disposisi atau sikap pelaksana. Faktor pendukung yang harus mendapat perhatian pada penerapan kebijakan adalah disposisi

para penyelenggara kebijakan. Ada tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain yaitu pemahaman terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak terhadap kebijakan serta intensitas respon tersebut.

- (6) Kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik. Dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana faktor eksternal turut berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Lingkungan eksternal ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat. Apabila kondisi eksternal tersebut tidak mendukung, hal ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan eksternal yang kondusif guna memastikan kelancaran proses implementasi kebijakan.

## **2) Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier**

Selanjutnya, Dalam (Subianto 2020:54) Kedua ilmuan Mazmanian dan Sabatier menjelaskan jika hal terpenting atas implementasi kebijakan publik yaitu mengidentifikasi Indikator yang bisa berpengaruh pada ketercapaian tujuan formal dalam seluruh tahap implementasi. Indikator ini dikelompokkan kedalam tiga kategori, yakni:

- (1) Variabel independen, yakni tingkat kemudahan maupun kesulitan permasalahan yang dikerjakan, sehingga berhubungan terhadap indikator permasalahan teori maupun teknis penyelenggaraan, keberagaman objek, serta perubahan yang diinginkan.
- (2) Variabel Intervening, yakni kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara benar tahap implementasi terhadap kejelasan maupun ketetapan tujuan,

menggunakan model kausal, kesesuaian alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis antara badan penyelenggara, aturan pelaksana dari lembaga penyelenggara, serta merekrut pejabat penyelenggara dengan transparansi terhadap pihak eksternal dan variabel eksternal kebijakan yang berpengaruh pada tahap penerapan yang berhubungan dengan keadaan sosio-ekonomi dan teknologi, dorongan publik, perilaku, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan dorongan atas mutu pemimpin berdasarkan pejabat penyelenggara.

- (3) Variabel dependen, yakni sebuah tahap pada saat mengimplementasikan lima tahap pengetahuan atas lembaga atau badan penyelenggara yang berbentuk penyusunan kebijakan penyelenggara kepatuhan objek, kerja nyata, penerimaan hasil nyata ini akan berfokus pada perbaikan aturan yang dibentuk dan dilakukan dengan menyeluruh dengan sifat mendasar.

### **3) Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III**

Menurut Edwards III dalam (Prmono, 2020) terdapat empat variabel utama yang saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Penjelasan dari masing-masing variabel yaitu:

- (1) Komunikasi, yaitu keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana pelaksana memahami tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tujuan serta sasaran kebijakan harus disampaikan secara jelas kepada kelompok target agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.
- (2) Sumber daya, walaupun kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, implementasi tidak akan berjalan efektif

- apabila pelaksana tidak memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya ini meliputi tenaga manusia yang kompeten dan dukungan anggaran atau dana yang cukup.
- (3) Disposisi, yang dimaksud dengan disposisi adalah sikap, karakter, dan komitmen dari pelaksana kebijakan. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan terhadap demokrasi menjadi faktor penting. Bila implementor tidak sejalan dengan visi pembuat kebijakan, maka proses implementasi berisiko tidak berjalan secara optimal.
  - (4) Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan juga memegang peran penting. Unsur dalam struktur birokrasi seperti prosedur operasional standar dan fragmentasi dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan.

#### **4) Model Implementasi Kebijakan Jan Merse**

Model Jan Merse (Pramono, 2020) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- (1) Isi kebijakan. Isi kebijakan harus tepat dan jelas sesuai dengan tujuan kebijakan untuk mendukung implementasi. Ketidakjelasan tujuan kebijakan serta isi kebijakan yang kurang tegas dapat menghambat implementasi kebijakan.
- (2) Distribusi potensi. pelaksanaan kebijakan menuntut adanya kolaborasi erat antara berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi penting karena masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda.
- (3) Informasi. Informasi yang jelas dan mudah dimengerti sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Informasi yang baik membantu para pelaksana memahami arah dan tujuan kebijakan dirancang.

- (4) Dukungan masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam proses implementasi. Dukungan masyarakat, baik berupa tindakan langsung maupun dukungan moral, dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

### **5) Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Agustino, 2016), keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Kedua aspek ini saling berkaitan dan secara bersama-sama menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara efektif.

- Isi Kebijakan atau Content of publicy menurut Grindle adalah sebagai berikut:

- (1) Kepentingan yang terlibat (*Interest Affected*) Kebijakan publik umumnya melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Penting untuk menilai sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut memengaruhi proses implementasi.
- (2) Jenis manfaat (*Type of Benefits*). Kebijakan harus mengandung nilai manfaat yang jelas dan terukur. Jenis-jenis manfaat ini menjadi indikator dampak positif yang diharapkan muncul dari penerapan kebijakan.
- (3) Tingkat perubahan yang diharapkan (*Extent of Change Envision*). Setiap kebijakan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi sejauh mana perubahan yang diharapkan, serta kejelasan target yang hendak dicapai.
- (4) Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*). Kejelasan tentang siapa dan di mana keputusan diambil sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena hal ini memengaruhi jalannya pelaksanaan secara keseluruhan.

- (5) Pelaksana program (*Program Implementer*). Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi pelaksana. Oleh karena itu, kebijakan harus dilaksanakan oleh pihak yang profesional dan memiliki pemahaman yang baik terhadap substansi kebijakan.
  - (6) Sumber daya yang dialokasikan (*Resources Committed*). Dukungan sumber daya baik manusia, finansial maupun material merupakan faktor penunjang penting agar proses implementasi dapat berlangsung secara optimal.
- Konteks implementasi atau *context of Implementation* menurut Grindle adalah sebagai berikut:
- (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*). Para aktor yang terlibat dalam kebijakan membawa pengaruh melalui kekuasaan, strategi, dan kepentingan masing-masing. Dinamika antaraktor ini sangat menentukan kelancaran atau hambatan dalam implementasi kebijakan.
  - (2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berwenang (*Institution and Regime Characteristic*). Lingkungan kelembagaan serta sistem pemerintahan tempat kebijakan dijalankan akan memengaruhi tingkat keberhasilan. Hal ini mencakup struktur, budaya kerja, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi atau lembaga yang berperan.
  - (3) Kepatuhan dan responsivitas (*Compliance and Responsiveness*). Kepatuhan serta respon pelaksana kebijakan dan arahan yang diberikan akan berpengaruh pada efektivitas kebijakan.

Berdasarkan atas beberapa model implementasi kebijakan diatas, penelitian ini akan berfokus pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn karena memberikan

kerangka analisis yang sistematis melalui enam variabel penting dalam implementasi kebijakan. Pendekatan *top-down* dalam model ini sesuai dengan konteks kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah, di mana arahan kebijakan berasal dari pemerintah daerah. Selain itu, model ini relevan untuk mengidentifikasi faktor hambatan implementasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

#### **2.4 Tinjauan Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis**

Sampah merupakan istilah umum yaitu limbah padat hasil aktivitas manusia maupun proses alami. Menurut (Ricky Febriyanto et al. 2021), sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari yang berbentuk padat. Sementara itu, (Chusnul Chotimah, 2020) menyatakan bahwa sampah adalah limbah yang dihasilkan dari proses produksi, baik dari sektor industri, domestik, maupun rumah tangga, yang tidak lagi digunakan atau dianggap tidak memiliki nilai guna oleh pemiliknya. Berikut adalah jenis-jenis sampah:

1. Berdasarkan sumber:
  - a) Sampah dari pemukiman. Sampah jenis ini dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga di lingkungan tempat tinggal seperti rumah, asrama, atau apartemen. Umumnya, sampah yang dihasilkan bersifat organik, misalnya sisa makanan, serta anorganik seperti plastik, kertas, dan limbah kering lainnya.
  - b) Sampah dari tempat umum dan kawasan perdagangan. Tempat seperti pasar, pusat perbelanjaan, terminal, dan area publik lainnya memiliki potensi tinggi dalam menghasilkan sampah. Hal ini disebabkan tingginya intensitas aktivitas manusia di tempat-tempat tersebut dan pasar.

2. Berdasarkan bentuk:
  - a) Sampah padat merupakan limbah berupa benda padat, tidak termasuk tinja, urin, atau limbah cair lainnya. Contohnya adalah sampah dapur, daun kering, plastik, logam, kaca, dan sejenisnya.
  - b) Sampah cair merupakan limbah dalam bentuk cair yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang, seperti air limbah rumah tangga, cucian, atau limbah cair dari kegiatan industri ringan.
3. Berdasarkan sifat:
  - a) Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari bahan alami atau hayati dan dapat terurai secara biologis oleh mikroorganisme dalam waktu singkat. Contohnya termasuk sisa makanan, ranting, dan daun-daunan.
  - b) Sampah anorganik merupakan Sampah ini berasal dari bahan non-hayati, seperti hasil olahan industri dan pertambangan. Contohnya antara lain plastik, logam, kaca, serta keramik. Dalam rumah tangga, bentuknya bisa berupa botol plastik, kaleng, atau wadah kaca.
  - c) Sampah Bahan Berbahaya Beracun (B3) merupakan sampah yang mengandung zat berbahaya dan beracun, baik dari sisi sifat, konsentrasi, maupun volumenya. Contohnya meliputi limbah medis, baterai bekas, limbah elektronik, cairan kimia, dan bahan mudah terbakar atau meledak.

Berdasarkan kesimpulan tentang Sampah rumah tangga adalah limbah padat yang berasal dari aktivitas sehari-hari masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Jenisnya mencakup sampah organik dan anorganik seperti sisa makanan, daun, plastik, dan kertas, namun tidak termasuk tinja dan limbah spesifik seperti limbah B3. Sementara itu, sampah sejenis rumah tangga berasal dari aktivitas di tempat umum, komersial, atau kawasan industri, namun memiliki karakteristik yang serupa dengan sampah rumah tangga, seperti kemasan produk, kertas dan plastik.

## 2.5 Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah

### 2.5.1 Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dapat menjadi tahap awal untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. Secara umum, pengertian pengelolaan sampah merupakan seluruh aktivitas yang dilaksanakan untuk mengatasi timbulan sampah hingga tahap pembuangan akhir (Juniartini, 2020). Pengelolaan sampah yaitu kegiatan secara tersistem dan berkesinambung yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008). Di tingkat daerah, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pada Pasal 3 bagian ketentuan umum, menetapkan arah kebijakan pengelolaan sampah yang terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu:

- Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis dilakukan melalui: pembatasan sampah, daur ulang dan memanfaatkan kembali sampah.
- Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis dilakukan melalui: pemilahan (yaitu proses memisahkan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya sejak dari sumbernya), pengumpulan (yaitu kegiatan mengumpulkan dan memindahkan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara (TPS), pengangkutan (yaitu membawa sampah dari TPS menuju tempat pengolahan atau pemrosesan akhir), pengolahan (yaitu proses mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar lebih aman atau bernilai guna), dan pemrosesan akhir (yaitu mengembalikan sisa sampah hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman dan ramah lingkungan) (Rinda Yanti dkk, 2024).

### **2.5.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah**

Menurut (OHS Consultant, 2024), pengelolaan sampah yang efektif harus mengacu pada sejumlah prinsip dasar guna menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Pengurangan dari sumbernya. Pengurangan sumber adalah upaya untuk meminimalkan timbulan sampah sejak awal, misalnya melalui penggunaan ulang barang, pembelian yang bijak, serta pemanfaatan produk tahan lama.
- 2) Daur ulang. Daur ulang adalah proses mengolah kembali bahan bekas menjadi produk baru yang bernilai guna, dengan tahapan seperti pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan material daur ulang.
- 3) Pengomposan. Pengomposan adalah mengelola sampah organik seperti sisa makanan dan limbah taman menjadi kompos yang bermanfaat bagi kesuburan tanah.
- 4) Pemanfaatan energi. Pemanfaatan energi adalah mengkonversi sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi energi melalui teknologi seperti pembakaran terkendali, dengan tetap memperhatikan sistem pengendalian emisi.

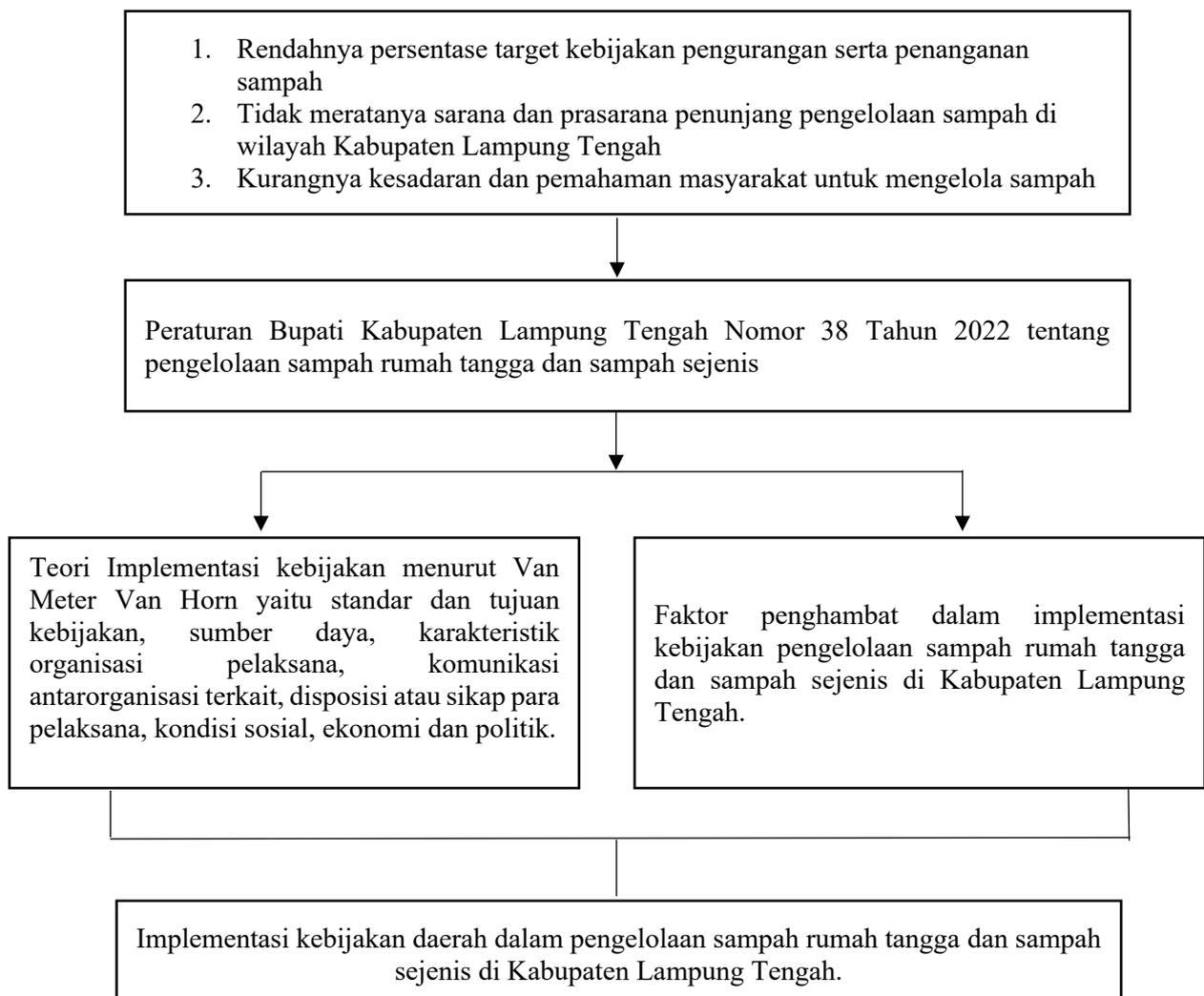
## **2.6 Kerangka Pikir**

Sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan paling serius di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, gaya hidup konsumtif serta rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah turut berkontribusi pada semakin menumpuknya sampah. Mengatasi permasalahan ini pemerintah melalui Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia dengan ini memiliki target pencapaian penyelenggaraan Jakstranas yaitu diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan Penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Dengan ini dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai upaya pengelolaan sampah yang lebih baik di tingkat Provinsi maupun Kota atau Kabupaten.

Implementasi kebijakan ini di Tingkat nasional dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan pelaksanaan di tingkat daerah menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Dengan hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai pelaksana kebijakan serta pengawas pada tingkat provinsi, pengawasan dilakukan untuk seluruh daerah Kabupaten atau Kota di Lampung, Termasuk Kabupaten Lampung Tengah. Salah satu bentuk implementasinya di Kabupaten Lampung Tengah adalah melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022. Dengan jumlah penduduk tertinggi, yakni sekitar 1.508,33 jiwa dan merupakan penyumbang timbulan sampah terbesar kedua di Provinsi Lampung. Namun demikian, capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022, 2023 dan 2024 belum memenuhi target kebijakan yang telah ditentukan.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung tengah yaitu tinggi nya jumlah timbulan sampah dan rendahnya persentase target kebijakan pengurangan serta penanganan sampah. Kabupaten Lampung Tengah dalam kebijakan pengelolaan sampah juga baru menjangkau 2 kecamatan dari total 28 kecamatan. Lalu sarana seperti truk sampah, gerobak sampah dan alat berat lainnya serta prasarana seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pengelola sampah di Kabupaten Lampung Tengah belum tersebar secara merata dan berfokus di wilayah pusat kota sementara itu daerah pedesaan kurang diperhatikan. Selain itu jenis Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kabupaten Lampung Tengah masih berjenis *open dumping* yaitu sampah dibuang begitu saja di tanah cekungan terbuka tanpa ditutup. Cara ini dapat mempengaruhi proses target penanganan sampah di pemrosesan akhir karena tidak ada proses pemilahan sampah di TPA. Hal lainnya yaitu karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengelola sampah.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah, selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan sebagai penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan landasan teori tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dirancang untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah telah diimplementasikan, dengan ini kerangka pemikiran penelitian adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. Kerangka Pikir**

*Sumber: Data diolah peneliti (2025)*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penulis memilih metode penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini mengandalkan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, atau objek, serta berfokus pada pemahaman mendalam tentang situasi dan proses. Metode ini tidak hanya berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga memahami alasan di balik fenomena yang diamati, melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Lampung Tengah. Melalui metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan diterapkan oleh pihak terkait dan memahami hambatan serta peluang yang muncul dalam proses tersebut.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian memiliki peran penting karena berkaitan erat dengan jenis data yang akan dihimpun dan dianalisis. Penentuan Fokus ini bertujuan untuk menentukan batas penelitian yang akan dilakukan sehingga memperjelas dan mempertajam bahasan.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan model implementasi Van Meter Van Horn yaitu:

1) Standar dan tujuan kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan mencakup kejelasan standar dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis. serta hasil tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut dijalankan.

2) Sumber daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup ketersediaan dan kesiapan berbagai sumber daya pendukung. Penelitian ini akan mengkaji aspek sumber daya manusia, termasuk jumlah dan peran pegawai serta petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan kebijakan tersebut. serta kelengkapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada kecukupan sumber dana yang dialokasikan untuk mendukung implementasi kebijakan.

3) Karakteristik organisasi pelaksana

Dalam penelitian ini karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur organisasi pelaksana utama, pola hubungan yang terjadi antar pelaksana. Pelaksana yang bertanggung jawab yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Tengah. Serta cakupan atau luas wilayah dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

4) Komunikasi antar-organisasi terkait

Dalam hal ini berkaitan dengan komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dengan perangkat

daerah (Kecamatan Terbanggi Besar dan Kelurahan Bandar Jaya Barat) yang merupakan fokus daerah pelaksanaan kebijakan.

5) Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana dalam penelitian ini yaitu kemauan dan kemampuan pelaksana menjalankan kebijakan, serta sikap pelaksana yaitu pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dan perangkat daerah dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah.

6) Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Dalam hal ini mencakup kondisi sosial, seperti kesadaran dan partisipasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam pengelolaan sampah. Kondisi ekonomi dalam hal ekonomi masyarakat untuk pembiayaan pengelolaan sampah. Dari sisi politik penelitian ini berkaitan terhadap dukungan pemerintah daerah serta kebijakan yang berlaku.

2. Pembahasan terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah. Melalui identifikasi hambatan-hambatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja serta efektivitas kebijakan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

### **3.3 Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah dengan berfokus pada Kecamatan Terbanggi Besar. Peneliti lebih fokus di Kecamatan Terbanggi Besar dikarenakan kecamatan ini menjadi fokus dan wilayah model Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah untuk menerapkan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga

dan sejenis dengan berdasarkan dokumen penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) serta sebagai pusat daerah. Sehingga Kecamatan Terbanggi Besar dianggap sebagai tempat yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah.

### **3.4 Sumber data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui teknik seperti wawancara dan observasi lapangan. Data ini dikumpulkan secara khusus untuk menjawab permasalahan penelitian dan memiliki sifat orisinal (Sugiyono, 2019). Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan. Melalui kombinasi wawancara dan observasi tersebut, peneliti diharapkan mampu memperoleh pemahaman mengenai proses implementasi kebijakan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merujuk pada informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber lain yang telah terlebih dahulu mengumpulkan dan menyusunnya. Umumnya, data ini berbentuk dokumen, arsip, buku, laporan resmi, atau data publik lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi dokumen kebijakan, dokumentasi pelaksana, data statistik, serta literatur ilmiah yang mendukung dan berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang relevan dengan objek kajian, sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam dan kontekstual mengenai topik penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah.

**Tabel 5. Informan Terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

No.	Jabatan	Informasi
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.	Informasi mengenai kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah.
2.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.	Penjelasan mengenai pelaksanaan kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah.
3.	Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelolaaan Sampah serta Pengawas Bank Sampah DLH Berjaya Kabupaten Lampung Tengah.	Penjelasan mengenai proses pengolahan sampah yang dilakukan UPTD sekaligus Bank Sampah DLH Berjaya Kabupaten Lampung Tengah.
4.	Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kabupaten Lampung Tengah	Penjelasan mengenai penanganan sampah yaitu pemrosesan akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kabupaten Lampung Tengah.

5.	Camat Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.	Penjelasan mengenai pelaksanaan kerja sama perangkat daerah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.
6.	Lurah Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.	Penjelasan mengenai kegiatan nyata di lapangan dengan peran masyarakat langsung dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.
7.	Ketua Komunitas Muda Pembaharu	Penjelasan mengenai pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah.

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025)

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dalam mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, serta menganalisis dokumen yang sejalan, misalnya laporan, arsip, catatan, atau dokumen tertulis.

**Tabel 6. Dokumentasi**

No.	Dokumen	Substansi
1.	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012	Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.
3.	Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022	Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah.
4.	Dokumen penyusunan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	Arah kebijakan dan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dalam pengelolaan sampah.

(sumber: Diolah oleh peneliti, 2025)

### 3. Observasi

Menurut Sugiyono (2019), observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengamati secara langsung kegiatan, perilaku, atau fenomena tertentu pada objek penelitian.

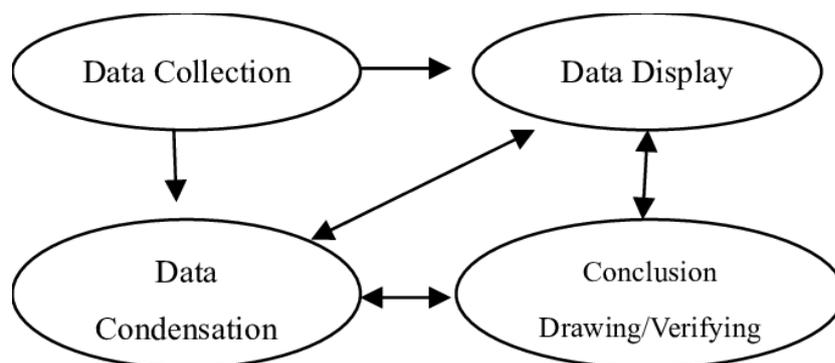
**Tabel 7. Gambaran Objek Observasi Penelitian**

No.	Objek yang diamati	Informasi
1.	Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Bank Sampah.	Mengetahui pelaksanaan kegiatan nyata mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah.
2.	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan dan fasilitas pengelola sampah.	Mengetahui ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaksana dan sarana prasarana pendukung. Serta melihat sikap pelaksana terhadap tujuan kebijakan.
3.	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan	Mengetahui struktur organisasi pelaksana kebijakan, pembagian tugas dan bentuk koordinasi antar pelaksana.
4.	Lingkungan Kabupaten Lampung Tengah	Mengetahui perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah.

*(sumber: Diolah oleh peneliti, 2025)*

### 3.6 Teknik Analisa Data

Pengelolaan data telah dikumpulkan dan dikelola, tahap selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan temuan data dalam bentuk narasi atau penjelasan verbal. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan model analisis data kualitatif dari Miles, Huberman, dan Saldana sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2019). Pemilihan model ini didasarkan pada alurnya yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga mempermudah proses interpretasi data. Model analisis ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu:



**Gambar 3. Komponen Teknik Analisis Data Kualitatif**

*Sumber: (Miles, Huberman dan Saldana, 2014)*

### 1. Pengumpulan data (*Data Collecion*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap objek studi, yang mencakup wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah mengenai kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, Kepala Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelola Bank Sampah DLH Berbenah, serta perangkat daerah di kecamatan dan kelurahan. Selain itu, data sekunder berupa dokumen kebijakan, kondisi pengelolaan sampah, dan peraturan daerah juga dikumpulkan untuk memperkuat hasil analisis.

### 2. Kondensasi data (*Data Condensation*)

Berdasarkan data yang telah terkumpul dari berbagai sumber kemudian dikondensasi, yaitu melalui proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan peringkasan informasi. Proses ini mencakup penelaahan terhadap data capaian pengelolaan sampah tahun 2022–2024, dokumen Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 mengenai kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis, serta hasil observasi kondisi TPS dan TPA. Wawancara dengan sejumlah informan kunci juga dianalisis dan disederhanakan guna memperoleh data yang lebih tajam, relevan, dan sistematis. Hasil-hasil tersebut dikelompokkan berdasarkan temuan utama dan pola-pola yang muncul.

### **3. Penyajian data (*Data display*)**

Setelah melalui tahap kondensasi, data disusun dalam bentuk penyajian yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Penyajian ini dapat berbentuk narasi deskriptif, tabel, grafik, atau visualisasi lain yang mendukung penarikan kesimpulan. Penyusunan data dalam format yang terstruktur ini mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan yang lebih mudah dimengerti.

### **4. Menarik kesimpulan (*Conclusion drawing*)**

Kesimpulan tidak hanya ditarik di akhir proses penelitian, tetapi juga dikembangkan secara bertahap selama analisis berlangsung. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil wawancara, dokumentasi, dan data sekunder yang telah dianalisis sebelumnya. Seluruh data tersebut diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah. Kesimpulan akhir dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi atau saran yang relevan dengan temuan penelitian.

## **3.7 Teknik Uji Keabsahan Data**

### **1. Uji kredibilitas (*credibility*)**

Uji kredibilitas bertujuan untuk menilai tingkat kepercayaan terhadap data dalam proses penelitian. Dalam konteks penelitian ini, kredibilitas diuji menggunakan teknik triangulasi, yaitu metode pemeriksaan data melalui penggabungan berbagai teknik pengumpulan informasi dan sumber data yang beragam. Tujuannya adalah untuk mengecek keakuratan informasi dan memperkuat temuan dengan pembandingan diluar data utama penelitian. Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan serta mengecek konsistensi data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2019), triangulasi sumber mencakup perbandingan hasil informasi yang diperoleh pada waktu dan dari alat yang berbeda. Dalam praktiknya, hasil

wawancara akan dibandingkan dengan dokumen visual seperti foto atau gambar, serta referensi ilmiah yang relevan.

## **2. Uji transferabilitas (*transferability*)**

Uji transferabilitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks atau situasi lain di luar lokasi penelitian. Untuk memastikan hal ini, peneliti menyajikan hasil penelitian secara rincian, sistematis, dan jelas mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis di Kabupaten Lampung Tengah. Uraian yang mendalam ini bertujuan agar pembaca maupun peneliti lain dapat memahami konteks studi dengan baik dan menilai apakah temuan tersebut relevan untuk diaplikasikan di tempat lain.

## **3. Uji dependabilitas (*dependability*)**

Uji dependabilitas berfokus pada konsistensi data serta proses yang dilakukan peneliti. Untuk menguji aspek ini, dilakukan proses audit terhadap keseluruhan tahapan penelitian. Dalam studi ini, uji dependabilitas dilakukan melalui bimbingan intensif dengan dosen pembimbing yang berperan sebagai auditor. Peneliti berkonsultasi secara berkelanjutan guna memastikan tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan maupun dalam pelaksanaan penelitian itu sendiri penelitian.

## **4. Uji konfirmabilitas (*confirmability*)**

Uji Konfirmabilitas bertujuan menguji objektivitas hasil penelitian, yaitu sejauh mana temuan dapat dikonfirmasi oleh pihak lain berdasarkan jejak proses yang dilakukan. Dalam penelitian ini, konfirmabilitas diuji melalui penyajian yang transparan mengenai seluruh tahapan pelaksanaan penelitian, khususnya terkait penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti memastikan bahwa proses yang ditempuh bebas dari bias pribadi dan dapat ditelusuri secara logis.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di Kabupaten Lampung Tengah, maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Dalam implementasi kebijakan, berdasarkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, keberhasilan suatu kebijakan di pengaruhi oleh berbagai aspek yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Standar dan tujuan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah telah jelas ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis. Kedua yaitu sumber daya, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah terhambat oleh keterbatasan sumber daya yang meliputi jumlah sumber daya manusia yang minim, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta anggaran yang hanya cukup untuk operasional dasar. Ketiga yaitu karakteristik organisasi pelaksana, meliputi struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah telah terbentuk secara formal berdasarkan hukum yang jelas, pola hubungan vertikal antar pelaksana atas dan bawah telah berjalan. Namun terbatasnya cakupan wilayah akibat kurangnya petugas dan fasilitas menyebabkan kebijakan belum menjangkau seluruh daerah, terutama pedesaan, sehingga pelaksanaan belum merata dan menyeluruh. Keempat yaitu komunikasi antar organisasi, komunikasi telah terjalin antar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dengan kecamatan dan kelurahan, namun bersifat tidak rutin, dan belum sistematis. Kelima yaitu

disposisi atau sikap pelaksana yaitu pegawai pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, kecamatan dan kelurahan menunjukkan sikap positif, serta memiliki kemauan. Terakhir yaitu keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dari sisi kondisi sosial kesadaran masyarakat masih rendah karena edukasi belum merata dan berkelanjutan. Secara ekonomi, pendapatan masyarakat yang beragam membuat partisipasi dalam pembayaran retribusi pengelolaan sampah kurang optimal. Dukungan politik hanya melalui regulasi kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah tidak sepenuhnya berjalan optimal.

2. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah:

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis di Kabupaten Lampung Tengah secara umum telah memiliki landasan kebijakan yang baik. Kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, yaitu:

- 1) Kurangnya kemampuan di kalangan pelaksana utama kebijakan yaitu pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dalam menghadapi hambatan penerapan pengelolaan sampah.
- 2) Keterbatasan sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana serta sumber daya anggaran menjadi penghambat utama dalam operasional kebijakan. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi jumlah, maupun kualitas menyebabkan rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti armada pengangkut sampah, tempat penampungan sementara, dan fasilitas daur ulang yang rusak dan tidak

berfungsi juga menghambat kelancaran proses pengelolaan sampah. Di sisi lain, alokasi anggaran yang minim membuat pelaksanaan terbatas karena hanya cukup untuk kegiatan operasional dasar saja seperti pengangkutan sampah, biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan pengangkut, pembiayaan gaji petugas kebersihan di lapangan. Sehingga terbatas untuk mendanai seluruh kegiatan mulai dari pengolahan sampah terpadu atau teknologi inovasi pengolahan sampah lanjutan, pembangunan TPS3R dan edukasi masyarakat, sehingga berdampak pada pencapaian tujuan kebijakan yang kurang maksimal.

- 3) Cakupan wilayah kebijakan berfokus pada daerah perkotaan, sehingga belum menyeluruh ke seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
- 4) Terakhir yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah masih rendah, kemampuan ekonomi masyarakat terbatas terhadap pembiayaan retribusi penanganan sampah. Serta dukungan politik dari pemerintah hanya sebatas regulasi kebijakan, pengelolaan sampah belum menjadi prioritas pembangunan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan pada hasil kesimpulan diatas, peneliti disini akan memberikan saran mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah disarankan untuk memprioritaskan pengelolaan sampah sebagai bagian penting dalam Pembangunan daerah dan memberi dukungan infrastruktur pengelolaan sampah terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Serta mendukung dalam mendorong investor atau pihak swasta untuk bekerja sama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah disarankan untuk memperkuat kapasitas pengawai melalui program pelatihan teknis secara berkala dalam pengelolaan sampah. Mengoptimalkan kuantitas pegawai serta sarana dan prasarana di bidang pengelolaan sampah untuk memperluas

cakupan layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Tengah, perkuat sistem monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah agar kendala yang dihadapi di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani serta mendorong bank sampah yang lebih aktif, inovasi untuk pengelolaan sampah yang lebih modern, seperti menggabungkan teknologi, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta. <http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v9i2.2779>
- Astuti, W., & Kamil, I. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Pasirlayung). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 5328-5341.
- Chotimah, C. (2020). *Pengelolaan sampah dan pengembangan ekonomi kreatif di kawasan destinasi wisata pesisir pantai selatan Tulungagung*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2020). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: ITB.
- Fauziah, W. E., & Arif, L. (2021). Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam tinjauan pembangunan jalan lingkar selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672-691.
- Febriyanto, R. (2021). *Analisis Sampah Dosmetik*. CV Tri Karya Banten.
- Ginting, R. L. E. B., & Hanani, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara. *Journal Of Publicy And Management*. Volume 13 No. 3 Tahun 2024). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.45101>
- Hartawan, R. C., Kosasih, F., & Rochmani (2023). Implementasi Model Kebijakan Sistem Zonasi Van Meter dan Van Horn. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*. 2 (1348-1358).
- Ifansyah, M.N., Purwanto, Purnaweni, H., Yuningsih, T., dan Anwar, A. (2023). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tabalong. *Jurnal Public Policy*. <https://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/6189/pdf>

- Iqbal, M., Mulyadin, Ariawan, & Subarudi (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 19 No. 2 November 2022: 129-140. <http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2022.19.2.129-140>
- Iriawan, H. (2024). *Teori Kebijakan Publik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group. ISBN: 978-634-206-125-1
- Juniartini, N. L. P. (2020). Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil Dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.106>
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Komarudin, A., Rosmajudi, A., & Hilman, A. (2023). Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 3(4), 41-49.
- Komarudin, Rosmajudi, Hilman (2023). *Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya*. Indonesian Journal of Education and Humanity, 3(4 SE-Articles), 41-49. <https://doi.org/10.58812/ejimes.v2i01.163>
- Krisnawansyah (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Pengolahan Dengan Sistem Reduce Reuse Recycle Berbasis Masyarakat di Kabupaten Solok. *Ensiklopedia of Journal*, 3(5), 261-268. <https://doi.org/10.33559/eoj.v3i5.1001>
- Lolong, R., Rares, J., & Palar, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 8 (124)
- Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285-292.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. ISBN: 9781452257877
- Moleong, lexy. (2016). *Metode penelitian kualitatif (8th ed.)*. CV Pustaka Setia.

ISBN: 979-514-051-5

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. ISBN: 979-514-051-5

Muhsin, M., et al. (2024). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan desa menggunakan model Van Meter dan Van Horn. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*. Vol. 6, No 1. <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i1.21561>

Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nugroho, R. (2014). *Public Policy* . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. ISBN Edisi 5: 9786020241616

OHS Consultant. (2024) Strategi Pengelolaan Sampah Panduan Praktis Untuk Masyarakat dan Pemerintah.

Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 537-550.

Patarai, Dr. H. Muhammad Idris (2020) Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan. Makassar. ISBN: 978-602-263-179-8

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah Lampung Tengah.

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Lampung Tengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Pramono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta:

UNISRI Press. ISBN: 978-623-94743-6-2

- Putri, U.K., & Yuliani, F. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Vol. 1, No. 11, Juni 2024. Hal 962-974.*
- Putri, Z. A., & Purnamasari, H. (2025). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 114-126.
- Randi. (2018). *Teori Penelitian Terdahulu*. Jakarta: Erlangga.
- Sitompul, Y.E., et al. (2024). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan tegal Rejo. *Jurnal Majalah Ilmiah Methoda Vol. 14 No. 2 Mei-Agustus 2024: 229-234*. <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol14No2.pp229-234>
- Solichin, A. W. (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Makassar: Humanities Genius.
- Subarsono, A.G. (2023). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan XII Agustus 2023, Yogyakarta: Penerbit Ombak. ISBN 979-3721-72-3
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brillian, PT Menuju Insan Cemerlang. [https://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/bitstream/handle/dx/1071/Kebijakan%20Publik\\_151220\\_opt.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/bitstream/handle/dx/1071/Kebijakan%20Publik_151220_opt.pdf?sequence=3&isAllowed=y)
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya : Brilliant. ISBN: 978-602-7862-74-6
- Sugiyono. (2019). *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. ISBN 978-602-289-533-6
- Sulila, I. (2021). *The Influence of Structure, Resources, Disposition and Communication on Small-and Medium-Sized Enterprises' Empowerment Policy Implementation in Indonesia*. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 1213-1223.

<https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.1213>

Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Teori Dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404Process>.

Yanti, R., Dharma, S., Elita, N., & Ibrahim, H. (2024). *Buku Ajar Pengelolaan Lingkungan*. Jambi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.